

Genealogi Pendidikan Islam Nusantara: Kritik Epistemologis Terhadap Pesantren, Surau, Dayah, dan Madrasah dalam Konstruksi Islam Nusantara

Muhammad Arif Luthfi¹

Program Studi Pendidikan Agama Islam STIT Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan

Email : muhammadariflutfi@stitmakrifatulilmi.ac.id

Keywords: Nusantara Islamic Education; Genealogy; Hybrid Epistemology; Islamic boarding schools; Surau; Dayah; Madrasah; Islam Nusantara; Power Relations; Globalization of Islamic Education.

Kata Kunci: Pendidikan Islam Nusantara; Genealogi; Epistemologi Hibrid; Pesantren; Surau; Dayah; Madrasah; Islam Nusantara; Relasi Kuasa; Globalisasi Pendidikan Islam.

Abstract:

Nusantara Islamic education has developed through a complex historical process shaped by the interaction between Islamic traditions, local culture, educational modernization, the state, and globalization. Most existing studies remain dominated by historical-descriptive and normative approaches, with limited attention to power relations, knowledge production, and epistemological contestation underlying contemporary Islamic education in Indonesia. This study analyzes the genealogy of Nusantara Islamic education through a proportional examination of pesantren, surau, dayah, and madrasah, and examines the relationship between traditionalism, modernity, and globalization in shaping Indonesian Islamic education. The research employs a qualitative approach using a library research design and a critical-genealogical perspective based on Michel Foucault's framework. Data were collected from books, peer-reviewed journals (Scopus-indexed and equivalent), and relevant academic publications published between 2001 and 2025. Analysis was conducted through content analysis, historical analysis, epistemological analysis, and critical synthesis. The findings reveal that Nusantara Islamic education functions as an arena of knowledge production and power relations that continuously transforms through negotiations between local traditions, global Islam, educational modernization, the state, and digitalization. This study proposes the concept of "hybrid epistemology of Nusantara Islamic education" —a framework for reading Indonesian Islamic education as a dynamic process of knowledge formation shaped by the encounter between tradition, modernity, and globalization — as a theoretical contribution to contemporary Islamic education studies.

Abstrak:

Pendidikan Islam Nusantara berkembang melalui proses historis yang kompleks sebagai hasil interaksi antara tradisi Islam, budaya lokal, modernisasi pendidikan, negara, dan globalisasi. Sebagian besar kajian mengenai pendidikan Islam Nusantara masih didominasi pendekatan historis-deskriptif dan normatif sehingga belum banyak mengkaji relasi kuasa, produksi pengetahuan, dan kontestasi epistemologis yang membentuk pendidikan Islam Indonesia kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis genealogi pendidikan Islam Nusantara melalui perkembangan pesantren, surau, dayah, dan madrasah secara proporsional, serta mengkaji relasi antara tradisionalisme, modernitas, dan globalisasi dalam pembentukan pendidikan Islam Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain library research dan perspektif kritis-genealogis berbasis pemikiran Michel Foucault. Data diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah bereputasi, dan publikasi akademik yang relevan. Kriteria inklusi meliputi relevansi tema, ketersediaan pada rentang waktu 2001 hingga 2025, dan kredibilitas akademik sumber. Analisis dilakukan melalui content analysis, analisis historis, analisis epistemologis, dan sintesis kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam Nusantara merupakan arena produksi pengetahuan dan relasi kuasa yang terus mengalami transformasi melalui negosiasi antara tradisi lokal, Islam global, modernisasi pendidikan, negara, dan digitalisasi. Penelitian ini menawarkan konsep “epistemologi hibrid pendidikan Islam Nusantara”, yaitu kerangka analisis untuk membaca pendidikan Islam Indonesia sebagai proses dinamis pembentukan pengetahuan yang terbentuk melalui perjumpaan antara tradisi, modernitas, dan globalisasi, bukan sebagai tradisi yang statis atau representasi budaya yang tunggal, sebagai kontribusi teoritis dalam studi pendidikan Islam kontemporer.

A. Introduction

Pendidikan Islam di Indonesia merupakan konstruksi historis yang terbentuk melalui proses interaksi kompleks antara Islam, budaya lokal, jaringan ulama, kolonialisme, modernisasi, dan negara (Azra, 2004; Steenbrink, 1986). Berbeda dengan model pendidikan Islam di beberapa wilayah Timur Tengah yang cenderung lebih terpusat dan homogen, pendidikan Islam Nusantara berkembang dalam bentuk yang plural melalui institusi seperti pesantren di Jawa, surau di Minangkabau, dayah di Aceh, serta madrasah modern yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia (Dhofier, 2011; Hefner, 2022). Keragaman pendidikan Islam Indonesia memang mencerminkan evolusi kompleks yang dibentuk oleh negosiasi sosial, budaya, dan politik yang sedang berlangsung. Analisis sejarah mengungkapkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia telah beralih dari akar informal pada abad ke-13 ke sistem formal yang terintegrasi ke dalam kerangka pendidikan nasional, beradaptasi dengan berbagai konteks sosial-politik dari waktu ke waktu (Kurniawati & Aulia, 2025)

Dalam perkembangan kontemporer, pendidikan Islam Indonesia mengalami perubahan yang signifikan seiring menguatnya arus globalisasi, modernisasi pendidikan, dan perkembangan teknologi digital. Pesantren yang sebelumnya dipahami sebagai lembaga pendidikan tradisional kini mengalami transformasi menjadi institusi yang lebih adaptif melalui integrasi kurikulum nasional, penguatan pendidikan sains dan teknologi, serta pengembangan moderasi beragama (Erihadiana dkk., 2026; Nurtawab & Wahyudi, 2022). Transformasi serupa juga berlangsung pada surau di Minangkabau, dayah di Aceh, dan madrasah di berbagai wilayah Indonesia (Alfurqan dkk., 2025; Rohman dkk., 2023). Namun demikian, modernisasi tersebut juga melahirkan persoalan epistemologis baru, seperti dikotomi ilmu agama dan ilmu umum, birokratisasi otoritas pendidikan, komodifikasi lembaga pendidikan Islam, serta pergeseran otoritas keagamaan akibat digitalisasi pengetahuan (Lohlker & Wahid, 2026; S. H. Wahid, 2024).

Di sisi lain, menguatnya kajian Islam Nusantara dalam pendidikan Islam Indonesia turut memengaruhi cara pendidikan Islam dipahami dan direpresentasikan. Islam Nusantara sering diposisikan sebagai model Islam moderat yang menekankan toleransi, multikulturalisme, dan kemampuan berdialog dengan budaya lokal (Muhammad & Duderija, 2022). Dalam konteks pendidikan, pesantren dan tradisi lokal dipandang sebagai basis utama pembentukan nilai moderasi dan harmoni sosial (Erihadiana dkk., 2026). Sejumlah kajian internasional menempatkan pendidikan Islam Indonesia sebagai model penting bagi pengembangan Islam moderat di tengah masyarakat plural dan demokratis (Hefner, 2022, 2009), sehingga pendidikan Islam Nusantara memiliki posisi strategis dalam wacana global tentang hubungan antara Islam, demokrasi, dan multikulturalisme.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian mengenai pendidikan Islam Nusantara masih didominasi pendekatan historis-deskriptif dan cenderung bersifat normatif. Banyak kajian lebih menekankan aspek harmonisasi budaya dan moderasi Islam tanpa melakukan pembacaan kritis terhadap relasi kuasa, produksi pengetahuan, dan kontestasi otoritas yang

berlangsung di dalamnya (Akmaliah dkk., 2024). Akibatnya, pendidikan Islam Nusantara sering direpresentasikan secara romantik sebagai entitas budaya yang harmonis dan stabil, padahal dalam perkembangan historisnya terdapat berbagai konflik epistemik antara tradisionalisme, modernisme, puritanisme, dan transnasionalisme Islam (Jubba dkk., 2022; Suharto, 2017). Selain itu, kajian yang memosisikan surau, dayah, dan madrasah sebagai arena produksi pengetahuan dan relasi kuasa secara setara dan proporsional masih relatif terbatas (Alfurqan dkk., 2025).

Secara epistemologis, konsep Islam Nusantara sendiri memerlukan pembacaan yang lebih kritis. Dalam banyak diskursus akademik dan sosial-politik, Islam Nusantara tidak hanya berfungsi sebagai kategori budaya atau identitas keagamaan, tetapi juga sebagai konstruksi diskursif yang berkaitan dengan legitimasi otoritas keagamaan, moderasi beragama, dan pembentukan identitas Muslim Indonesia kontemporer (Kersten, 2016; Muhammad & Duderija, 2022). Sebagaimana ditunjukkan oleh (Akmaliah dkk., 2024), konstruksi Islam moderat di Indonesia merupakan produk negosiasi diskursif yang panjang antara tokoh-tokoh organisasi Islam besar dan berbagai tekanan sosial-politik, sehingga Islam Nusantara tidak dapat dipahami semata sebagai representasi Islam lokal yang harmonis, melainkan juga sebagai arena perebutan makna dan otoritas dalam menentukan bentuk Islam yang dianggap sah (Boogert, 2026).

Terdapat pula dimensi geopolitik yang perlu dicermati. (M. A. Wahid, 2025) menunjukkan bahwa representasi Islam dalam media global telah berkembang menjadi neo-orientalisme yang mereproduksi narasi tentang Islam melalui platform digital. Dalam konteks ini, perkembangan teknologi digital dan globalisasi Islam memperlihatkan bahwa pendidikan Islam Indonesia kini berada dalam jaringan pengetahuan transnasional yang semakin kompleks (Mubarokah dkk., 2026; S. H. Wahid, 2024) Pesantren, madrasah, surau, dan dayah tidak lagi hanya berinteraksi dengan tradisi lokal, tetapi juga dengan arus globalisasi pendidikan, media digital, dan jaringan Islam transnasional yang

membentuk pola baru produksi pengetahuan keagamaan (Eickelman & Anderson, 2003; Zaid dkk., 2022).

Berangkat dari kesenjangan akademik tersebut, penelitian ini menawarkan konsep “epistemologi hibrid pendidikan Islam Nusantara” sebagai upaya memahami pendidikan Islam Indonesia sebagai hasil negosiasi antara tradisi lokal, Islam global, modernitas, negara, dan perkembangan teknologi kontemporer (Asad, 1986; Bhabha, 2012; Foucault & Gordon, 1980). Konsep ini menempatkan pendidikan Islam Nusantara bukan sebagai tradisi yang statis ataupun sekadar representasi budaya lokal, melainkan sebagai proses dinamis pembentukan pengetahuan dan identitas Muslim Indonesia yang melibatkan relasi kuasa, kontestasi epistemologis, dan hibridisasi budaya secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji genealogi pendidikan Islam Nusantara secara kritis melalui pendekatan epistemologis. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, bagaimana genealogi pendidikan Islam Nusantara terbentuk melalui perkembangan pesantren, surau, dayah, dan madrasah dalam konteks sejarah sosial-keagamaan Indonesia? Kedua, bagaimana relasi antara tradisi, lokalitas, modernitas, negara, dan globalisasi membentuk dinamika pendidikan Islam Nusantara pada keempat institusi tersebut? Ketiga, bagaimana konstruksi diskursus Islam Nusantara direpresentasikan dalam pendidikan Islam Indonesia, serta problem epistemologis apa yang muncul di dalamnya? Keempat, bagaimana kontestasi antara tradisionalisme, modernisme, dan transnasionalisme Islam memengaruhi produksi pengetahuan dan otoritas dalam pendidikan Islam Nusantara?

B. Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan kritis-genealogis. Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang menjadikan sumber-sumber tertulis sebagai basis utama dalam proses pengumpulan dan

analisis data (Zed, 2008). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis genealogi pendidikan Islam Nusantara melalui perkembangan pesantren, surau, dayah, dan madrasah dalam konteks relasi antara tradisi, modernitas, negara, dan globalisasi.

Landasan filosofis penelitian ini bertumpu pada perspektif Michel Foucault mengenai genealogi, relasi kuasa, dan produksi pengetahuan (Foucault & Gordon, 1980). Pendekatan genealogis dioperasionalkan melalui empat langkah analitis: (1) penelusuran historis terhadap pembentukan dan transformasi institusi pendidikan Islam Nusantara; (2) identifikasi diskontinuitas, konflik, dan negosiasi dalam perkembangan tersebut; (3) analisis mekanisme produksi dan legitimasi pengetahuan dalam setiap konteks historis; serta (4) dekonstruksi narasi dominan yang menutupi relasi kuasa yang beroperasi di balik konstruksi Islam Nusantara. Genealogi dalam konteks ini bukan sekadar perspektif teoritis, tetapi prosedur analitis yang diterapkan secara konkret pada korpus literatur yang dikumpulkan (Koopman, 2013).

Unit analisis penelitian ini meliputi berbagai diskursus mengenai pendidikan Islam Nusantara yang berkaitan dengan transformasi pesantren, surau, dayah, dan madrasah; modernisasi pendidikan Islam; moderasi beragama; globalisasi pendidikan Islam; serta konstruksi epistemologi hibrid. Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup buku, artikel jurnal ilmiah bereputasi (terindeks Scopus dan sederajat), serta publikasi akademik yang membahas pendidikan Islam Nusantara, modernisasi pendidikan Islam, dan teori genealogi. Referensi teoretis utama mencakup karya Michel Foucault, Talal Asad, Edward Said, Homi K. Bhabha, Azyumardi Azra, Zamakhsyari Dhofier, Martin van Bruinessen, Ronald Lukens-Bull, Robert Hefner, dan Karel Steenbrink. Sumber sekunder meliputi tesis, disertasi, prosiding, dan laporan penelitian yang relevan.

Kriteria inklusi literatur meliputi tiga hal, yaitu: (1) relevansi tema dengan pendidikan Islam Nusantara, genealogi, relasi kuasa, dan/atau epistemologi Islam; (2) rentang waktu publikasi antara 2001 hingga 2025, dengan pengecualian terhadap karya-karya teoritis klasik (Foucault, Asad, Said,

Bhabha, Azra, dan lain-lain) yang bersifat foundational; serta (3) kredibilitas akademik sumber, diprioritaskan jurnal terindeks internasional. Kriteria eksklusi mencakup sumber yang tidak memiliki relevansi tematik langsung, sumber yang tidak dapat dilacak aksesibilitasnya secara akademik, serta sumber yang belum melewati proses *peer review*.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Data yang terkumpul kemudian diidentifikasi, diklasifikasikan, dan disusun berdasarkan kategori tematik yang mencakup genealogi pesantren, surau, dayah, dan madrasah; relasi kuasa dalam pendidikan Islam; modernisasi dan globalisasi; serta epistemologi hibrid. Analisis data dilakukan melalui empat tahapan mengacu pada Miles, Huberman, dan Saldaña (2014): reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi, dan sintesis kritis. Teknik analisis yang digunakan meliputi *content analysis* (Krippendorff, 2004), analisis historis, analisis epistemologis, dan analisis kritis. Validitas data dan reliabilitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber dan komparasi antar-literatur.

Adapun keterbatasan penelitian ini perlu dinyatakan secara eksplisit. Sebagai penelitian kepustakaan, temuan penelitian ini dibatasi oleh ketersediaan dan aksesibilitas literatur yang dikaji. Penelitian ini tidak mengklaim keterwakilan empiris di lapangan; generalisasi yang ditawarkan bersifat konseptual-teoritis. Studi lapangan mengenai implementasi konkret epistemologi hibrid di masing-masing institusi — pesantren, surau, dayah, dan madrasah — perlu dilakukan dalam penelitian selanjutnya.

C. Result(s)

1. Genealogi Pendidikan Islam Nusantara: Pesantren, Surau, Dayah, dan Madrasah

a. Pesantren: Arena Reproduksi Pengetahuan dan Otoritas

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tertua dan paling berpengaruh di Nusantara. (Dhofier, 2011) mengidentifikasi lima unsur struktural pesantren —kiai, santri, masjid, pondok, dan kitab kuning— sebagai fondasi ekosistem keilmuan yang membentuk arsitektur epistemik hierarkis: kiai menempati

posisi puncak otoritas intelektual-spiritual, sementara kitab kuning berfungsi sebagai korpus kanonik yang menentukan batas-batas pengetahuan yang sah. Tradisi sanad keilmuan —rantai otoritas intelektual yang menghubungkan santri kepada kiai dan seterusnya kepada ulama awal— merupakan mekanisme legitimasi pengetahuan yang membedakan pesantren dari sistem pendidikan lainnya (Bruinessen, 1995).

Dalam perspektif genealogis, pesantren bukan entitas yang statis. (Nurtawab & Wahyudi, 2022) menunjukkan bahwa sejak disahkannya Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019, transformasi kelembagaan pesantren membawa implikasi epistemologis yang kompleks: pengakuan formal dalam sistem pendidikan nasional di satu sisi, tetapi tekanan reformasi struktural yang mengancam tradisi reproduksi sosial-epistemik di sisi lain. (Harto dkk., 2025) menegaskan bahwa proses negosiasi identitas keilmuan Islam di pesantren berlangsung melalui dialektika antara mempertahankan tradisi intelektual klasik dan merespons tuntutan modernitas, suatu proses yang penuh kontestasi internal. Dengan demikian, pesantren dipahami sebagai arena reproduksi pengetahuan Islam yang senantiasa bernegosiasi dengan kekuatan-kekuatan epistemologis eksternal —baik global, nasional, maupun lokal.

b. Surau: Negosiasi antara Islam Reformis dan Adat Minangkabau

Surau di Minangkabau memiliki karakter genealogis yang unik dan berbeda dari pesantren. Secara historis, surau berkembang tidak hanya sebagai tempat ibadah dan transmisi ilmu Islam, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berfungsi sebagai ruang mediasi antara ideologi reformis Islam —yang masuk melalui jaringan ulama dari Timur Tengah— dan tradisi adat Minangkabau yang bertumpu pada sistem matrilineal. (Alfurqan dkk., 2025) menunjukkan bahwa surau bukan sekadar transmitter ajaran Islam Timur Tengah, melainkan ruang rekonsiliasi antara dua sistem nilai yang saling berketegangan: prinsip-prinsip syariat Islam di satu sisi, dan norma-norma adat Minangkabau di sisi lain.

Dalam perspektif genealogis, perkembangan surau memperlihatkan bagaimana relasi kuasa bekerja dalam skala lokal. Gerakan Padri pada awal abad ke-19

merupakan salah satu momen epistemik paling dramatis dalam sejarah surau: upaya pemurnian Islam oleh kaum reformis berhadapan dengan resistensi tradisi adat, menghasilkan negosiasi yang membentuk ulang peta otoritas keagamaan di Minangkabau. Konflik ini —yang berakhir dengan kehadiran kolonialisme Belanda sebagai kekuatan ketiga— menunjukkan bahwa perkembangan surau tidak pernah berlangsung di dalam ruang sosial yang sepenuhnya otonom, melainkan selalu bersinggungan dengan kepentingan dan kekuatan eksternal. Genealogi surau dengan demikian memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa institusi pendidikan Islam Nusantara merupakan arena produksi pengetahuan yang sarat relasi kuasa.

c. Dayah: Ketahanan Epistemik dalam Konteks Konflik dan Otonomi

Dayah di Aceh memiliki genealogi yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang Kesultanan Aceh sebagai pusat peradaban Islam di ujung barat Nusantara. Dayah berkembang sebagai institusi pendidikan yang memadukan transmisi ilmu-ilmu Islam klasik dengan peran sosial-politik yang signifikan: ulama dayah secara tradisional memiliki posisi sentral dalam struktur sosial dan pemerintahan masyarakat Aceh. (Mappiasse & Hayadin, 2022) mendeskripsikan ekosistem pendidikan dayah sebagai sistem yang mengintegrasikan tujuh elemen budaya dalam praktik pembelajaran berbasis kitab kuning dan metode halaqah, mencerminkan ketahanan model pendidikan berbasis budaya yang berhasil mempertahankan relevansinya lintas generasi.

Dalam perspektif genealogis, dayah menunjukkan ketahanan epistemik yang luar biasa dalam menghadapi berbagai tekanan: kolonialisme Belanda yang menghancurkan struktur kesultanan, konflik bersenjata yang berkepanjangan, hingga era otonomi khusus pasca-perjanjian damai 2005. Setiap periode menghadirkan konteks relasi kuasa yang berbeda bagi dayah sebagai institusi. Era otonomi khusus Aceh, misalnya, membuka ruang bagi kebangkitan dayah dalam sistem pendidikan formal Aceh, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan baru berupa birokratisasi dan standardisasi yang berpotensi menggerus kekhasan epistemik dayah. Dengan demikian, genealogi dayah memperlihatkan

bahwa ketahanan institusi pendidikan Islam bukan hanya persoalan kelembagaan, tetapi juga persoalan epistemologis.

d. Madrasah: Hibridisasi antara Tradisi Islam dan Pendidikan Modern

Madrasah merupakan respons historis yang paling eksplisit terhadap tantangan modernitas dalam pendidikan Islam Nusantara. (Steenbrink, 1986) menjelaskan bahwa modernisasi pendidikan Islam di Indonesia merupakan respons terhadap penetrasi sistem pendidikan Barat pada masa kolonial sekaligus upaya mempertahankan identitas keislaman. Madrasah berkembang melalui sistem pendidikan klasikal, kurikulum modern, serta integrasi ilmu agama dan ilmu umum —sebuah perubahan paradigmatis dari sistem pesantren tradisional yang bertumpu pada otoritas personal kiai.

Dalam perspektif kritis-genealogis, modernisasi madrasah merepresentasikan pergeseran paradigma pengetahuan dalam pendidikan Islam, dari pola transmisi tradisional yang bertumpu pada otoritas personal guru menuju sistem yang lebih birokratis, terstandarisasi, dan akuntabel secara institusional. (Rohman dkk., 2023) membuktikan secara empiris bahwa integrasi tradisionalisme-modernisme dalam madrasah bukan penyangkalan terhadap tradisi, melainkan proses negosiasi epistemologis yang melahirkan lulusan yang kompetitif secara global sekaligus kuat secara keislaman. Madrasah dengan demikian dapat dipahami sebagai ruang hibrid epistemologis yang paling representatif dalam konteks pendidikan Islam Nusantara —sebuah institusi yang lahir dari ketegangan antara imperatif keislaman dan keniscayaan modernitas.

e. Jaringan Ulama Transnasional sebagai Fondasi Bersama

Genealogi keempat institusi tersebut memiliki satu benang merah yang menghubungkan mereka, jaringan ulama transnasional. (Azra, 2004) menunjukkan secara genealogis bagaimana jaringan intelektual antara ulama Nusantara dan ulama Haramain sejak abad ke-17 membentuk karakter keilmuan Islam Indonesia yang bersifat transnasional sekaligus lokal. Jaringan tersebut memengaruhi perkembangan pesantren, surau, dayah, dan madrasah —masing-masing dengan cara yang berbeda sesuai dengan konteks lokal

masing-masing. (Jubba dkk., 2022) memetakan bagaimana ketegangan antara Islam moderat dan konservatif di Indonesia berhubungan erat dengan pergeseran orientasi jaringan transnasional yang memengaruhi keempat lembaga pendidikan Islam tersebut. Dalam konteks kontemporer, jaringan transnasional tersebut telah berkembang melampaui batas-batas konvensional mobilitas fisik ulama menuju pertukaran intelektual digital yang semakin kompleks (Al-Masduqi dkk., 2025).

2. Pendidikan Islam sebagai Arena Relasi Kuasa

Dalam perspektif genealogis Foucault, pendidikan tidak pernah berdiri sebagai institusi yang netral karena selalu berkaitan dengan produksi pengetahuan, legitimasi sosial, dan relasi kuasa (Foucault & Gordon, 1980). Dalam konteks pendidikan Islam Nusantara, relasi kuasa tampak pada beberapa lapisan yang saling terkait.

Pertama, relasi kuasa dalam struktur otoritas tradisional. Posisi kiai dalam pesantren, ulama dayah, dan buya di surau dibangun tidak hanya melalui penguasaan ilmu agama, tetapi juga melalui legitimasi sosial, sanad keilmuan, dan praktik budaya yang mereproduksi otoritas religius secara berkelanjutan (Suresman & Faqihuddin, 2026). Dalam konteks ini, pendidikan Islam menjadi arena di mana pertanyaan “siapa yang berhak menafsirkan Islam” selalu dijawab melalui mekanisme sosial dan kultural, bukan hanya melalui kemampuan intelektual semata.

Kedua, relasi kuasa yang berkaitan dengan intervensi negara. Modernisasi pendidikan Islam telah mengubah struktur otoritas tradisional melalui birokratisasi pendidikan, integrasi kurikulum nasional, dan standardisasi kelembagaan. Negara memainkan peran penting dalam menentukan arah pendidikan Islam melalui regulasi kurikulum, kebijakan moderasi beragama, dan integrasi sistem pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. (Kosim dkk., 2023) menunjukkan bahwa dinamika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia mencerminkan negosiasi antara kepentingan negara, organisasi Islam, dan lembaga pendidikan.

Ketiga, relasi kuasa dalam diskursus moderasi beragama. Moderasi beragama sering direpresentasikan sebagai nilai normatif yang netral. Namun dalam perspektif Foucauldian, moderasi juga dapat dipahami sebagai mekanisme normalisasi yang menentukan batas-batas keberagamaan yang diterima secara sosial dan politik. Pendidikan Islam kemudian menjadi instrumen penting dalam membentuk kategori mengenai Islam “moderat,” “nasionalis,” dan “toleran” —sekaligus memarginalkan bentuk-bentuk keberagamaan lain yang dianggap tidak sesuai dengan konstruksi nasionalisme keagamaan Indonesia.

Keempat, relasi kuasa dalam era digital. Perkembangan media digital telah mengubah pola produksi otoritas keagamaan secara fundamental. Otoritas keagamaan yang sebelumnya berpusat pada kiai dan ulama tradisional kini menghadapi tantangan dari ustaz digital, platform dakwah daring, dan media sosial Islam (Lohlker & Wahid, 2026; Raya, 2024). (S. H. Wahid, 2024) melalui analisis bibliometrik menunjukkan pergeseran nyata menuju platform daring sebagai medium ekspresi keagamaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa relasi kuasa dalam pendidikan Islam Nusantara kini bergerak dari model otoritas tradisional menuju bentuk otoritas yang lebih cair, kompetitif, dan terhubung dengan kapitalisme digital global.

3. Modernisasi, Globalisasi, dan Kontestasi (Tradisionalisme, Modernisme, Transnasionalisme)

Modernisasi pendidikan Islam di Indonesia berlangsung melalui tiga kecenderungan sekaligus, yaitu adaptasi terhadap sistem pendidikan modern, globalisasi Islam yang memperluas jaringan pengetahuan, dan munculnya gerakan Islam transnasional yang menghadirkan orientasi epistemologis alternatif. Ketiga kecenderungan ini berada dalam kontestasi yang terus-menerus, membentuk dinamika pendidikan Islam Nusantara kontemporer.

Tradisionalisme —yang diwakili oleh pesantren Salafiyah, dayah, dan surau tradisional— berupaya mempertahankan legitimasi epistemik melalui sistem sanad, kitab kuning, dan otoritas kiai. Modernisme —yang tercermin dalam perkembangan madrasah dan pesantren modern— mendorong integrasi ilmu agama dan ilmu umum, adopsi sistem pendidikan nasional, serta

pengembangan kompetensi global. Sementara itu, transnasionalisme Islam — terutama melalui pengaruh Salafisme dan Islamisme global— menghadirkan orientasi epistemologis yang berbeda, yang berfokus pada purifikasi akidah dan penolakan terhadap sinkretisme budaya lokal. (Malik, 2024) menunjukkan bahwa kemunculan pesantren berbasis Salafi dalam berbagai variannya merupakan respons langsung terhadap tekanan kategorisasi ini dan mencerminkan pertarungan epistemologis mengenai tradisi, modernitas, dan legitimasi keislaman.

Kontestasi antara ketiga kecenderungan ini tidak berlangsung dalam kerangka yang sepenuhnya dikotomis. Justru, sebagaimana ditunjukkan oleh (Lukens-Bull, 2001), modernisasi dalam pesantren tidak selalu berarti sekularisasi, ia merupakan proses adaptasi budaya dan epistemologis. (Rohman dkk., 2023) membuktikan bahwa dikotomi tradisionalisme-modernisme dalam madrasah tidak dapat dipahami sebagai oposisi biner, melainkan sebagai proses hibridisasi yang mengintegrasikan sistem pendidikan nasional dengan identitas keislaman yang distinktif. Dengan demikian, kontestasi antara tradisionalisme, modernisme, dan transnasionalisme Islam perlu dipahami sebagai ketegangan produktif yang menjadi motor transformasi pendidikan Islam Nusantara — bukan sebagai pertarungan menuju resolusi akhir.

Globalisasi Islam turut memperkompleks dinamika ini. Perkembangan media sosial, platform dakwah digital, dan jaringan Islam transnasional berbasis internet memungkinkan penyebaran pengetahuan Islam secara lebih cepat dan terbuka, tetapi sekaligus melahirkan fragmentasi otoritas keagamaan. (Zaid dkk., 2022) menunjukkan bahwa generasi Muslim milenial secara aktif merenegosiasi otoritas dan praktik keislaman melalui interaksi dengan influencer media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa produksi pengetahuan dalam pendidikan Islam Nusantara tidak lagi sepenuhnya dimonopoli oleh institusi formal, tetapi tersebar dalam jaringan digital yang semakin kompleks.

4. Kritik terhadap Diskursus Islam Nusantara

Diskursus Islam Nusantara sering direpresentasikan sebagai bentuk Islam moderat yang menekankan toleransi, multikulturalisme, dan kompatibilitas

dengan demokrasi. Representasi tersebut memberikan legitimasi positif terhadap pendidikan Islam Indonesia di tingkat nasional maupun global. Namun, dalam perspektif genealogis-kritis, representasi ini tidak dapat diterima begitu saja sebagai kategori yang netral dan alamiah.

Dalam perspektif Said, representasi tentang Islam selalu berkaitan dengan relasi kuasa dan produksi pengetahuan. Islam Nusantara tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai konstruksi diskursif yang membentuk batas-batas mengenai Islam yang “moderat,” “tradisional,” dan “nasionalis.” (Alvian & Ardhani, 2023) menunjukkan bahwa konstruksi ini tidak pernah netral karena selalu berkaitan dengan proses produksi diskursus dan legitimasi kekuasaan tertentu. (Akmaliah dkk., 2024) memperkuat argumen ini: konstruksi Islam moderat di Indonesia merupakan produk negosiasi diskursif yang panjang antara tokoh-tokoh organisasi Islam besar, warisan pemikiran mereka, dan berbagai tekanan sosial-politik pasca-Orde Baru.

Kecenderungan romantisasi lokalitas dalam kajian pendidikan Islam juga perlu dikritisi. Banyak penelitian menempatkan pesantren, surau, dan dayah sebagai ruang harmonis yang bebas dari konflik sosial dan kontestasi ideologis. Padahal, sebagaimana telah diperlihatkan dalam analisis genealogis di atas, setiap institusi tersebut berkembang melalui pertarungan antara tradisionalisme, reformisme Islam, kolonialisme, nasionalisme, dan transnasionalisme yang sarat ketegangan. Dengan demikian, pendidikan Islam Nusantara tidak pernah berada dalam kondisi yang sepenuhnya stabil dan homogen.

Representasi Islam Nusantara sebagai model Islam moderat global juga memiliki dimensi geopolitik yang tidak dapat diabaikan. Dalam banyak diskursus internasional, Islam Indonesia diposisikan sebagai antitesis terhadap Islam Timur Tengah. Perspektif tersebut di satu sisi memberikan legitimasi positif terhadap pendidikan Islam Indonesia, tetapi di sisi lain berpotensi menyederhanakan keragaman tradisi Islam Nusantara menjadi sekadar simbol moderasi untuk konsumsi geopolitik. (Amrizon dkk., 2025; Kartiko dkk., 2020) mengingatkan bahwa kategorisasi “Islam moderat” versus “Islam radikal”

berpotensi mengaburkan kompleksitas historis, ideologis, dan sosial yang sesungguhnya ada dalam tradisi pendidikan Islam Nusantara.

5. Epistemologi Hibrid Pendidikan Islam Nusantara: Sintesis Konseptual

Berdasarkan analisis genealogis, kritis, dan komparatif di atas, konsep “epistemologi hibrid pendidikan Islam Nusantara” dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, pendidikan Islam Nusantara merupakan hasil konstruksi historis yang mempertemukan tradisi lokal, jaringan ulama transnasional, kolonialisme, modernitas, negara-bangsa, dan perkembangan globalisasi digital dalam satu proses produksi pengetahuan yang kompleks dan terus bergerak. Pesantren, surau, dayah, dan madrasah dipahami sebagai ruang hibridisasi epistemik yang masing-masing mengintegrasikan unsur tradisional, nasional, dan global dengan cara yang khas dan kontekstual.

Kedua, pengetahuan Islam dalam konteks ini tidak bersifat tunggal dan final, melainkan dibentuk melalui interaksi antara otoritas agama, budaya lokal, kekuasaan negara, dan dinamika globalisasi yang terus bergerak. Hibriditas epistemik tampak konkret dalam berbagai bentuk: integrasi kitab kuning dengan kurikulum nasional di pesantren; negosiasi antara syariat Islam dan adat Minangkabau di surau; ketahanan sistem halaqah dayah dalam menghadapi tekanan birokratisasi; serta munculnya madrasah sebagai ruang sintesis yang paling eksplisit antara tradisi Islam dan modernitas pendidikan.

Ketiga, epistemologi hibrid tidak berlangsung tanpa ketegangan. Globalisasi digital, fragmentasi otoritas keagamaan, dan menguatnya transnasionalisme Islam menghadirkan tantangan baru bagi stabilitas epistemik pendidikan Islam Nusantara. Pesantren, surau, dayah, dan madrasah tidak dapat lagi beroperasi hanya dalam ruang lokal yang tertutup; mereka harus menavigasi jaringan pengetahuan global yang semakin kompleks sambil mempertahankan legitimasi tradisi keilmuan lokal.

Keempat dan ini merupakan implikasi kritis yang paling penting epistemologi hibrid harus dipahami bukan sebagai sintesis yang sepenuhnya harmonis, tetapi sebagai arena negosiasi epistemologis yang terus mengalami kontestasi. Negara, organisasi Islam, media digital, dan jaringan global memiliki peran besar dalam

menentukan bentuk pengetahuan Islam yang dianggap sah. Oleh karena itu, konsep ini perlu digunakan dengan kesadaran kritis yang memadai: hibriditas bukan jaminan kesetaraan epistemik; ia tetap berlangsung dalam konteks relasi kuasa yang tidak seimbang.

D. Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam Nusantara merupakan konstruksi historis yang terbentuk melalui interaksi dinamis antara tradisi Islam, budaya lokal, jaringan ulama transnasional, modernisasi pendidikan, negara, dan globalisasi. Genealogi pesantren, surau, dayah, dan madrasah —yang dikaji secara proporsional dalam penelitian ini— memperlihatkan bahwa keempat institusi tersebut tidak berkembang sebagai entitas pendidikan yang tunggal dan homogen, melainkan sebagai ruang sosial dan epistemologis yang terus mengalami transformasi sesuai dengan perubahan konteks sosial-keagamaan masing-masing. Surau memperlihatkan negosiasi antara reformisme Islam dan adat Minangkabau; dayah menunjukkan ketahanan epistemik dalam konteks konflik dan otonomi; pesantren mencerminkan dialektika antara transmisi tradisi klasik dan tuntutan modernisasi; sementara madrasah lahir sebagai hibridisasi paling eksplisit antara tradisi Islam dan sistem pendidikan modern.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendidikan Islam Nusantara merupakan arena relasi kuasa dan produksi pengetahuan yang bekerja pada beberapa lapisan sekaligus: struktur otoritas tradisional, intervensi negara, diskursus moderasi beragama, dan dinamika kapitalisme digital. Kontestasi antara tradisionalisme, modernisme, dan transnasionalisme Islam harus dipahami sebagai ketegangan produktif —bukan sebagai pertarungan menuju resolusi akhir— yang menjadi motor transformasi pendidikan Islam Nusantara secara berkelanjutan. Pembacaan kritis terhadap diskursus Islam Nusantara menunjukkan bahwa representasi Islam moderat bukan kategori yang netral, melainkan konstruksi diskursif yang berkaitan dengan relasi kuasa, politik identitas, dan kepentingan geopolitik.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan konsep “epistemologi hibrid pendidikan Islam Nusantara” sebagai kerangka konseptual untuk memahami transformasi pendidikan Islam Indonesia kontemporer. Epistemologi hibrid menunjukkan bahwa pendidikan Islam Nusantara berkembang melalui sintesis dinamis antara tradisi lokal, Islam global, modernitas, negara, dan perkembangan teknologi digital —bukan menuju sekularisasi penuh ataupun purifikasi tradisi secara absolut. Konsep ini memperlihatkan bahwa pendidikan Islam Nusantara pada hakikatnya adalah ruang negosiasi epistemologis yang terus bergerak, di mana berbagai epistemologi bertemu, diperdebatkan, dan direkonstruksi secara simultan. Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada kemampuan konsep ini untuk mengintegrasikan tradisionalisme, modernisme, transnasionalisme, dan digitalisasi dalam satu kerangka analisis yang koheren, melampaui pendekatan yang terfragmentasi dalam kajian-kajian terdahulu.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas kajian pendidikan Islam Nusantara melalui pendekatan genealogis dan kritik epistemologis yang menempatkan pendidikan Islam sebagai arena produksi pengetahuan dan relasi kuasa. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan pentingnya pengembangan model pendidikan Islam yang mampu mengintegrasikan tradisi keilmuan Islam klasik, moderasi beragama yang reflektif dan kritis, literasi digital, serta kebutuhan masyarakat global tanpa kehilangan karakter lokal masing-masing institusi. Penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada studi lapangan mengenai transformasi epistemologis masing-masing institusi di era digital, serta kajian interdisipliner mengenai relasi antara pendidikan Islam, media digital, dan politik identitas untuk memahami dinamika pendidikan Islam Indonesia kontemporer secara lebih komprehensif dan berimbang.

E. References

- Akmaliah, W., Sulistiyanto, P., & Sukendar. (2024). Making Moderate Islam in Indonesia. *Studies in Conflict & Terrorism*, 47(11), 1495–1509.
<https://doi.org/10.1080/1057610X.2022.2034224>

- Alfurqan, A., Tamrin, M., Hidayat, A. T., & Syaputri, W. (2025). Harmony and divergence: Unraveling the influence of Surau in Minangkabau religious landscape. *Cogent Arts & Humanities*, 12(1), 2510057. <https://doi.org/10.1080/23311983.2025.2510057>
- Al-Masduqi, H. S. F., Matkur, & Mustajab. (2025). The Existence Of Ulama In The Digital Era: : A Framing Analysis Of Gus Miftah's Misspeaking Using Robert Entman's Model. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 10(1), 79–98. <https://doi.org/10.29240/AJIS.V10I1.12972>
- Alvian, R. A., & Ardhani, I. (2023). The Politics of Moderate Islam in Indonesia: Between International Pressure and Domestic Contestations. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 61(1), 19–57. <https://doi.org/10.14421/AJIS.2023.611.19-57>
- Amrizon, Suhaimis, AM, R., Karim, S., & Wahyuni, S. (2025). ISLAM MODERAT VERSUS TRADISIONAL: TINJAUAN HUKUM DAN PENDIDIKAN. *An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(3), 835–847. <https://doi.org/10.51806/AN-NAHDLAH.V4I3.684>
- Asad, T. (1986). *The Idea of An Anthropology of Islam*.
- Azra, Azyumardi. (2004). *The origins of Islamic reformism in Southeast Asia : networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern "Ulama" in the seventeenth and eighteenth centuries*. Asian Studies Association of Australia in association with Allen & Unwin ; University of Hawai'i Press.
- Ball, S. J. . (2008). *The education debate*. Policy Press.
- Bhabha, H. K. (2012). The location of culture. *The Location of Culture*, 1–408. <https://doi.org/10.4324/9780203820551>
- Boogert, J. W. P. van den. (2026). How Local Is Islam Nusantara? Questions of Tolerance and Authenticity. *Religions* 2026, Vol. 17, Page 65, 17(1), 65. <https://doi.org/10.3390/REL17010065>
- Bruinessen, M. van. (1995). *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Mizan.

- Dhofier, Zamakhsyari. (2011). *Tradisi pesantren: studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia*. LP3ES.
- Eickelman, D. F. ., & Anderson, J. W. . (2003). *New media in the Muslim world: the emerging public sphere*. Indiana University Press.
- Erihadiana, M., Mahmud, M., Nurdiansyah, R., Gozali, S., Nurwahyu, R. A. H., & Ramdani, N. W. (2026). The Existence of Islamic Boarding School in The Internalization of Religious Moderation Values: A Systematic Literature Review. *Academia Open*, 11(1).
<https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.13127>
- Foucault, Michel., & Gordon, Colin. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. Pantheon Books.
- Gani, J. K. (2022). From discourse to practice: Orientalism, western policy and the Arab uprisings. *International Affairs*, 98(1), 45–65.
<https://doi.org/10.1093/ia/iiab229>
- Hajar, A. (2024). Navigating Globalization: Reforming Islamic Education for the 21st Century. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 2(1), 53–65.
<https://doi.org/10.61194/IJIS.V2I1.599>
- Harto, J., Setiawan, D., Saepuddin, A., Asyraf, M., & Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, U. (2025). Reconfiguring Pesantren Education: The Dialectic between Tradition, Modernity, and Transnational Islam. *Mozaic : Islam Nusantara*, 11(2), 147–160.
<https://doi.org/10.47776/MOZAIC.V11I2.1818>
- Hefner, R. W. (2022). How Indonesia Became a World Leader in Islamic Education: A Historical Sociology of a Great Transformation. *Muslim Education Review*, 1(1), 3–18. <https://doi.org/10.56529/MER.V1I1.25>
- Hefner, R. W. . (2009). *Making modern Muslims: the politics of Islamic education in Southeast Asia*. University of Hawaii Press.
- Jong, A. (2025). Reconfiguring Political Islam: A Discursive Tradition Approach. *American Journal of Islam and Society*, 42(3–4), 6–41.
<https://doi.org/10.35632/AJIS.V42I3-4.3609>

- Jubba, H., Awang, J., Qodir, Z., Hannani, & Pabbajah, M. (2022). The contestation between conservative and moderate Muslims in promoting Islamic moderatism in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2116162>
- Kartiko, A., Mujtaba, M., Zuana, M., Sirojuddin, A., Anas, M., & Arif, M. '. (2020). ASWAJA Ke-NUan-BASED ISLAMIC MODERATE EDUCATION AS A RADICALISM STRATEGY. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 3(2), 88–101. https://doi.org/10.31943/AFKAR_JOURNAL.V3I2.98
- Kersten, Carool. (2016). *Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values*. Oxford University Press.
- Koopman, Colin. (2013). *Genealogy as critique: Foucault and the problems of modernity*. Indiana University Press.
- Kosim, M., Muqoddam, F., Mubarak, F., & Laila, N. Q. (2023). The dynamics of Islamic education policies in Indonesia. *Cogent Education*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2172930>
- Krippendorff, Klaus. (2004). *Content analysis: an introduction to its methodology*. Sage.
- Kurniawati, & Aulia, R. N. (2025). Islamic Religious Education in Indonesia: Practices and Current Developments. *Religionspädagogische Beiträge*, 48(1), 1–12. <https://doi.org/10.20377/RPB-1960>
- Lohlker, R., & Wahid, S. H. (2026). The Transformation of Islamic Religious Authority. *Religions* 2026, Vol. 17, Page 493, 17(4), 493. <https://doi.org/10.3390/REL17040493>
- Lukens-Bull, R. A. (2001). Two Sides of the Same Coin: Modernity and Tradition in Islamic Education in Indonesia. *Anthropology & Education Quarterly*, 32(3), 350–372. <https://doi.org/10.1525/aeq.2001.32.3.350>
- Malik, A. (2024). New variants of ultra-conservative Islamic schools in Indonesia: A study on Islamic school endeavor with Islamic group movement. *Power and Education*, 16(1), 14–28. <https://doi.org/10.1177/17577438231163042;ISSUE:ISSUE:DOI>

- Mappiasse, S., & Hayadin, H. (2022). STUDENTS' RELIGIOUS TOLERANCE: Comparing Muslim Students at Public Schools and Pesantren. *Journal of Indonesian Islam*, 16(2), 326. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.2.326-351>
- Marzuki, Zulkhairi, T., Suriana, Fikri, M., & Hayati. (2025). The Culture of Islamic Education in Dayah: A Holistic-Integrative Perspective. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 390–402. <https://doi.org/10.15575/JPI.V11I2.49267>
- Mubarokah, Purnama, S., Baroroh, U., & Muflikhun, M. A. (2026). The Impact of Western- and Middle Eastern-Educated Indonesian Scholars (1980–2010) on Islamic Education Challenges in Indonesia. *Culture 2026, Vol. 2, Page 7*, 2(2), 7. <https://doi.org/10.3390/CULTURE2020007>
- Muhammad, C. L., & Duderija, A. (2022). Understanding the Context and Concept of Islam Nusantara. *ICR Journal*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:250223943>
- Nurtawab, E., & Wahyudi, D. (2022). Restructuring Traditional Islamic Education in Indonesia: Challenges for Pesantren Institution. *Studia Islamika*, 29(1), 55–81. <https://doi.org/10.36712/sdi.v29i1.17414>
- Ramadhan, T. W. (2018). Islam Nusantara: Pribumisasi Islam ala NU. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 73–91. <https://doi.org/10.35309/ALINSYIROH.V2I1.3333>
- Raya, M. K. F. (2024). Digital Islam: new space for authority and religious commodification among Islamic preachers in contemporary Indonesia. *Contemporary Islam 2024* 19:1, 19(1), 161–194. <https://doi.org/10.1007/S11562-024-00570-Z>
- Rohman, A., Muhtamiroh, S., Imron, A., & Miyono, N. (2023). Integrating traditional-modern education in madrasa to promote competitive graduates in the globalization era. *Cogent Education*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2268456>
- Said, E. W. . (2021). *Orientalism*. Penguin.

- Steenbrink, K. A. (1986). *Pesantren, madrasah, sekolah: pendidikan Islam dalam kurun modern*. LP3ES.
- Suharto, T. (2017). Transnational Islamic education in Indonesia: an ideological perspective. *Contemporary Islam* 2017 12:2, 12(2), 101–122. <https://doi.org/10.1007/S11562-017-0409-3>
- Suresman, E., & Faqihuddin, A. (2026). From traditional religious leader to actor of social change: a comprehensive Systematic literature network analysis the role of a Kyai in Indonesia based on scopus database. *Cogent Arts & Humanities*, 13(1), 2625597. <https://doi.org/10.1080/23311983.2026.2625597>
- Tamboukou, M. (1999). Writing Genealogies: an exploration of Foucault's strategies for doing research. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 20(2), 201–217. <https://doi.org/10.1080/0159630990200202>
- Tatham, C. (2025). A systematic literature review of Third Space theory in research with children (aged 4-12) in multicultural educational settings. *Pedagogy, Culture & Society*, 33(3), 867–886. <https://doi.org/10.1080/14681366.2023.2283798>
- Wahid, M. A. (2025). From Orientalism to neo-Orientalism: medial representations of Islam and the Muslim world. *Textual Practice*, 39(2), 162–181. <https://doi.org/10.1080/0950236X.2023.2288112>
- Wahid, S. H. (2024). Exploring the intersection of Islam and digital technology: A bibliometric analysis. *Social Sciences & Humanities Open*, 10, 101085. <https://doi.org/10.1016/J.SSAHO.2024.101085>
- Widodo, S. A., Mubin, M. N., Sabarudin, & Pransiska, T. (2026). Reproducing Islamic knowledge in Indonesian pesantren: Turāt, textual tradition, and epistemic continuity. *British Journal of Religious Education*. <https://doi.org/10.1080/01416200.2026.2659837>
- Zaid, B., Fedtke, J., Shin, D. D., El Kadoussi, A., & Ibahrine, M. (2022). Digital Islam and Muslim Millennials: How Social Media Influencers Reimagine Religious Authority and Islamic Practices. *Religions* 2022, Vol. 13, Page 335, 13(4), 335. <https://doi.org/10.3390/REL13040335>

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

DOI, Copyright, and License	DOI: Copyright (c) 2026 author(s) Muhammad Arif Luthfi This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License 
How to cite	All citations and references must follow the APA 7th Edition guidelines.